

ANALISIS PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH , DANA ALOKASI UMUM, DAN LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH TERHADAP BELANJA DAERAH DI KABUPATEN MINAHASA

Rifando J. Tololiu¹, Een N. Walewangko², Steeva Y. L. Tumangkeng³

^{1,2,3}Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis,

Universitas Sam Ratulangi, Manado 95115, Indonesia

Email: rifandotololiu@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah, terhadap Belanja Daerah dan Belanja Langsung pada Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa. Analisis data dan pengujian hipotesis dilakukan menggunakan uji asumsi klasik dan regresi linear berganda. Sampel penelitian ini adalah *Time Series* yaitu 15 tahun. Hasil penelitian ini menggunakan dua variabel dependen, model 1 terhadap Belanja Daerah dan model 2 terhadap Belanja Langsung. Hasil penelitian model 1 secara parsial menunjukkan bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah Berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah. Dan pada hasil penelitian model 2 menunjukkan bahwa hanya variabel Pendapatan Asli Daerah yang berpengaruh signifikan terhadap Belanja Langsung, sedangkan Variabel Dana Alokasi Umum, dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah kurang berpengaruh terhadap Belanja Langsung. Dan pada penelitian yang dilakukan secara simultan menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah dan Belanja Langsung.

Kata Kunci: *Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Lain-Lain Pendapatan Yang Sah, Belanja Daerah, Belanja Langsung*

ABSTRACT

The purpose of this study was to analyze the effect of Regional Original Revenue, General Allocation Funds, and Other Legitimate Income, on Regional Expenditures and Direct Spending on the Minahasa District Government. Data analysis and hypothesis testing were performed using classical assumption and multiple linear regression tests. The sample of this study is the Time Series which is 15 years. The results of this study use two dependent variables, model 1 for Regional Expenditures and model 2 for Direct Expenditures. The results of the model 1 model partially show that the variables of Regional Original Revenue, General Allocation Funds, and Other Legitimate Income significantly influence Regional Expenditures. And in the results of the research model 2 shows that only the variables of Regional Original Revenue have a significant effect on Direct Expenditures, while the Variable of General Allocation Funds, and Other Legitimate Revenues are less influential on Direct Expenditures. And in research conducted simultaneously shows that the Regional Original Revenue, General Allocation Funds, and Other Legitimate Revenues have a significant effect on Regional Expenditures and Direct Expenditures.

Keywords: *Local Revenue, General Allocation Funds, Other Legitimate Revenues, Regional Expenditures, Direct Expenditures*

1. PENDAHULUAN

Latar Belakang

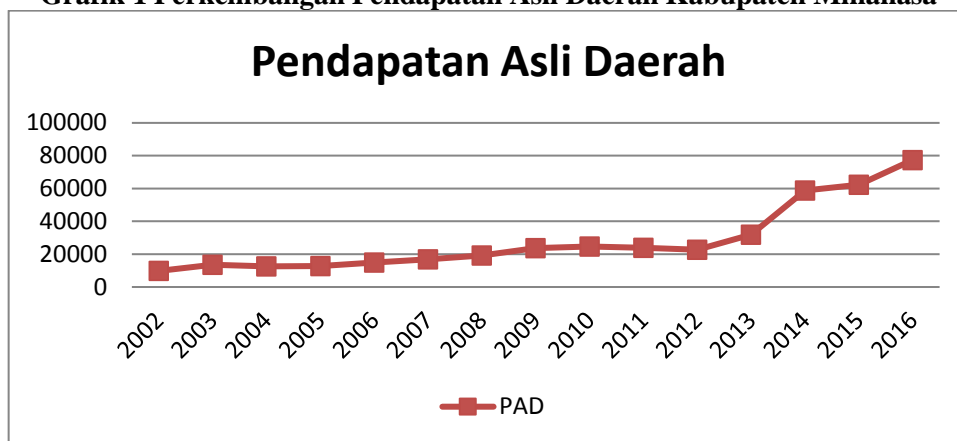
Pembangunan Ekonomi adalah merupakan salah satu upaya dalam rangka mendukung pelaksanaan salah satu prioritas yang tercantum dalam prioritas pembangunan Nasional, yaitu mempercepat pemulihan ekonomi dan memperkuat landasan pembangunan ekonomi berkelanjutan dan berkeadilan berdasarkan sistem kerakyatan. Penetapan prioritas tersebut mendasarkan pada masalah dan tantangan yang dihadapi serta arah kebijakan dalam pembangunan ekonomi, baik pembangunan jangka pendek maupun jangka panjang menengah.

Pembangunan nasional adalah upaya untuk meningkatkan seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara yang sekaligus merupakan proses pembangunan keseluruhan system penyelenggaraan Negara untuk mewujudkan tujuan nasional. Pembangunan nasional juga dapat diartikan sebagai rangkaian upaya pembangunan untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional. Dalam UU No. 33 Tahun 2014 ini juga di jelaskan tentang pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dan dana perimbangan. Dana perimbangan tersebut terdiri atas, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan bagian daerah dari bagi hasil pajak pusat. Permasalahan Dana Alokasi Umum terletak pada perbedaan cara pandang antara pemerintah pusat dan daerah. Bagi pusat DAU dijadikan sebagai instrumental horizontal imbalance, sedangkan bagi daerah, DAU dimaksudkan untuk mendukung kecukupan pembiayaan daerah (Hamdani, et, al, 2014). Permasalahan timbul ketika daerah meminta Dana Alokasi Umum yang besar atau sesuai dengan kebutuhan pembiayaan daerahnya. Disisi lain, alokasi DAU berdasarkan kebutuhan daerah dilakukan karena dasar perhitungan fiscal needs tidak memadai (terbatasnya data, belum adanya standar pelayanan minimum masing-masing daerah dan system penganggaran yang belum berdasar pada standar analisis belanja), ditambah total pengeluaran anggaran khususnya APBD belum mencerminkan kebutuhan sesungguhnya dan cenderung penggunaan DAU menjadi tidak efisien.

Salah satu bentuk hubungan keuangan pusat dan daerah adalah Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan Dana yang bersumber dari APBN, dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kegiatan khusus yang merupakan urusan dan merupakan urusan daerah sehingga dapat membantu mengurangi beban biaya kegiatan khusus yang harus ditanggung oleh pemerintah daerah. Sedangkan Dana Alokasi Umum (DAU) juga merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (UU Nomor 33 Tahun 2004). DAU diberikan pemerintah pusat untuk membiayai kekurangan dari pemerintah daerah dalam memanfaatkan PAD. DAU bersifat "*Block Grant*" yang berarti penggunaannya diserahkan kepada daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Perkembangan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Minahasa ditunjukkan pada Grafik 1 :

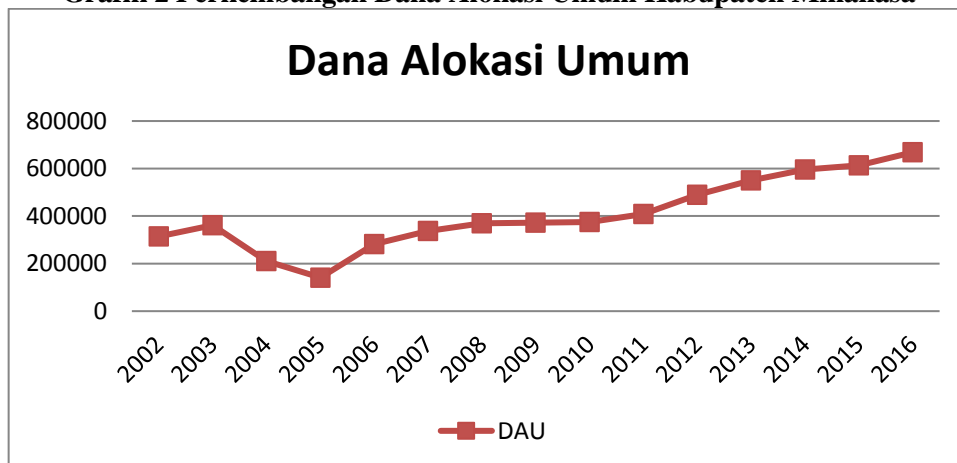
Grafik 1 Perkembangan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Minahasa



Dari grafik 1 diatas menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Minahasa mengalami sedikit berfluktuasi atau ketidak tetapan, pada tahun 2002 – 2003 Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Minahasa mengalami penurunan sebesar 7,2%, Dan pada tahun 2005 – 2010 PAD Kabupaten Minahasa mulai mengalami peningkatan, namun pada tahun 2011 PAD kabupaten Minahasa turun dengan presentase sebesar 3,4%, dan pada tahun 2012 – 2016 PAD Kabupaten Minahasa terus menerus mengalami peningkatan.

Dana Alokasi Umum adalah sejumlah dana yang di alokasikan Pemerintah Pusat kepada setiap Daerah Otonom (Provinsi/Kabupaten/kota) di Indonesia setiap tahunnya sebagai dana perimbangan. Perkembangan Dana Alokasi Umum Kabupaten Minahasa ditunjukkan pada grafik 2 :

Grafik 2 Perkembangan Dana Alokasi Umum Kabupaten Minahasa

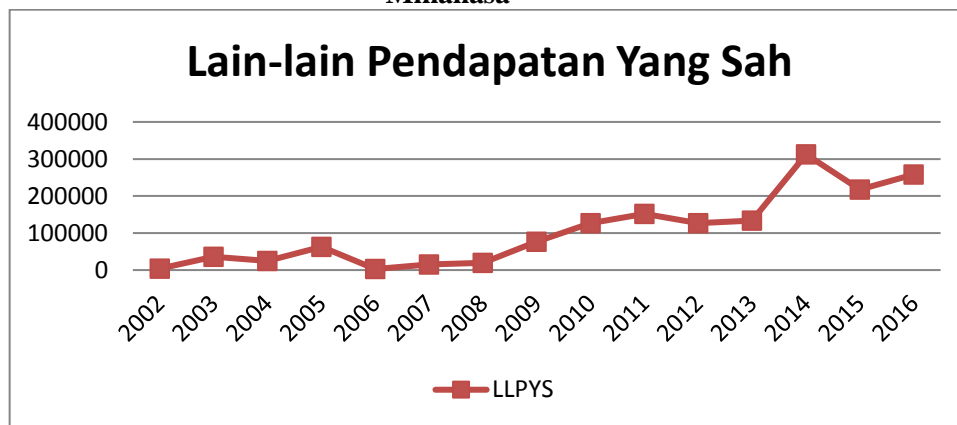


Dari grafik 2 diatas menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum Kabupaten Minahasa mengalami naik turun, pada tahun 2002 – 2003 DDU Kabupaten Minahasa mengalami peningkatan sebesar 14,7%. dan pada tahun 2004 – 2005 DDU Kabupaten Minahasa menurun, namun pada tahun 2006 DDU Kabupaten Minahasa kembali naik sebesar 99,7%, dan terus menerus naik sampai pada tahun 2016.

Lain-lain Pendapatan Yang Sah merupakan pendapatan yang diterima oleh Pemerintah Daerah yang terdiri dari pendapatan hibah dan penapatan dana darurat.

Perkembangan Lain-lain Pendapatan Yang Sah Kabupaten Minahasa ditunjukkan pada grafik 3 :

Grafik 3 Perkembangan Lain-lain Pendapatan Yang Sah Kabupaten Minahasa



Pada grafik 3 menunjukkan bahwa Lain-lain Pendapatan Yang Sah Kabupaten Minahasa mengalami peningkatan dan penurunan dari tahun 2002 – 2016, Namun penerimaan Lain-lain Pendapatan Yang Sah pada tahun 2003 mengalami peningkatan yang sangat tinggi yaitu sebesar 861,4% kemudian pada tahun berikutnya Lain-Lain Pendapatan Yang Sah terus mengalami peningkatan dan penurunan pada setiap tahunnya.

TINJAUAN PUSTAKA

Landasan Teori

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan suatu rencana untuk mencapai tujuan organisasi pada suatu periode yang dinyatakan dalam satuan moneter. APBD merupakan suatu alokasi penerimaan dan pengeluaran sebagai perencanaan pembangunan dengan mengkoordinasikan semua aktivitas dari berbagai unit kerja. Anggaran Daerah mempunyai peran penting yaitu sebagai pedoman dan panduan dalam pembangunan Pemerintah Daerah yang mencerminkan kebutuhan masyarakat daerah. APBD merupakan anggaran sektor publik yang harus diinformasikan untuk mendapatkan masukan dan kritikan dari anggota DPRD yang merupakan wakil dari masyarakat (Ghozali dan Ratmono 2008).

Alokasi Belanja Daerah

Belanja daerah adalah semua pengeluaran Pemerintah Daerah pada suatu periode Anggaran. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah terdiri dari tiga komponen utama, yaitu unsur penerimaan, belanja rutin dan belanja pembangunan. Ketiga komponen itu meskipun disusun hampir secara bersamaan, akan tetapi proses penyusunannya berada di lembaga yang berbeda. Proses penyusunan APBD secara keseluruhan berada di tangan Sekretaris Daerah yang bertanggung jawab mengkoordinasikan seluruh kegiatan penyusunan APBD. Sedangkan proses penyusunan belanja rutin disusun oleh Bagian Keuangan Pemerintah Daerah, proses penyusunan penerimaan dilakukan oleh Dinas

Pendapatan Daerah dan proses penyusunan belanja pembangunan disusun oleh Bappeda (Dedy Haryadi et al, 2001 dalam Pratiwi, 2007).

Alokasi Belanja Langsung

Belanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang pembagian Belanja Langsung terdiri dari:

1. Belanja Pegawai
Belanja pegawai dalam hal ini untuk pengeluaran honorarium/upah dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah.
2. Belanja barang dan jasa
Belanja barang dan jasa digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah.
3. Belanja Modal
Belanja Modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan asset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan irigasi dan jaringan, dan asset tetap lainnya.

Pendapatan Asli Daerah

Penerimaan Pendapatan Asli Daerah merupakan akumulasi dari Pos Penerimaan Pajak yang berisi Pajak Daerah dan Pos Retribusi Daerah, Pos Penerimaan Non Pajak yang berisi hasil perusahaan milik daerah, Pos Penerimaan Investasi serta Pengelolaan Sumber Daya Alam (Bastian, 2002) Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah identifikasi sumber Pendapatan Asli Daerah adalah meneliti, menentukan dan menetapkan mana sesungguhnya yang menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah dengan cara meneliti dan mengusahakan serta mengelola sumber pendapatan tersebut dengan benar sehingga memberikan hasil yang maksimal. (Elita dalam Pratiwi, 2007).

Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi. Pembagian dana untuk daerah melalui bagi hasil berdasarkan daerah penghasil cenderung menimbulkan ketimpangan antar daerah dengan mempertimbangkan kebutuhan dan potensi daerah.

Lain-lain Pendapatan Yang Sah

Lain-lain Pendapatan Yang Sah merupakan pendapatan yang diterima oleh Pemerintah Daerah yang terdiri dari pendapatan hibah dan penempatan dana darurat. Kelompok lain-lain pendapatan yang sah mencakup :

1. Hibah berasal dari pemerintah, pemerintah daerah lainnya, badan/lembaga/ organisasi swasta dalam negeri, kelompok masyarakat/perorangan, dan lembaga luar negeri yang tidak meningkat;
2. Dana darurat dari pemerintah dalam rangka penanggulangan korban/kerusakan akibat bencana alam;
3. Dana bagi hasil pajak dari provinsi kepada kabupaten/kota;
4. Dana penyesuaian dan dana otonomi khusus yang ditetapkan oleh pemerintah, dan
5. Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya.

2. METODE PENELITIAN

3.

Jenis Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder *time series*, yang bersumber dari Badan Pusat Statistika (BPS) Minahasa.

Metode Analisis Data

Uji Asumsi Klasik

Asumsi klasik yang digunakan adalah asumsi klasik heteroskedastisitas, multikolinearitas, dan auto korelasi. dalam literatur ekonometrika dikemukakan berapa asumsi klasik yang harus dipenuhi oleh suatu model regresi agar model regresi tersebut dapat dipakai. asumsi klasik tersebut adalah bebas heteroskedastisitas, tidak ada multikolinearitas, dan bebas auto korelasi.

Analisis Regresi Berganda

Analisis ini digunakan untuk mengetahui besarnya variabel independen terhadap variabel dependen, dengan asumsi variabel yang lain konstan dimana rumusnya :

$$Y_1 = a + b_1 x_1 + b_2 x_2 +$$

$$Y_2 = a + b_1 x_1 + b_2 x_2 +$$

Keterangan:

- Y1 = Belanja Daerah
- Y2 = Belanja Langsung
- X1 = Pendapatan Asli Daerah
- X2 = Dana Alokasi Umum
- X3 = Lain-lain Pendapatan Yang Sah
- a = Konstanta regresi
- b_1, b_2, b_3 = Koefisien regresi

Uji Statistik-T

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas/independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen.

Kriteria pengujian:

Ho: $b_1, b_2, b_3 = 0$, Artinya, variabel pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan lain-lain pendapatan yang sah tidak berpengaruh yang signifikan terhadap variabel belanja daerah dan belanja langsung.

Ha: $b_1, b_2, b_3 \neq 0$, Artinya, variabel pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan lain-lain pendapatan yang sah berpengaruh yang signifikan terhadap variabel belanja daerah dan belanja langsung.

Cara melakukan uji t adalah sebagai berikut :

- $t_{hitung} \geq t_{tabel}$, maka Ho ditolak dan Ha diterima
- $t_{hitung} \leq t_{tabel}$, maka Ho diterima dan Ha ditolak
-

Uji Statistik F

Uji Statistik F digunakan untuk menguji tingkat signifikansi koefisien regresi variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen, Kriteria pengujian:

Ho: $b_1, b_2, b_3 = 0$, Artinya, variabel pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan lain-lain pendapatan yang sah secara bersama-sama tidak

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel belanja daerah dan belanja langsung.

Ha: $b_1, b_2, b_3 \neq 0$, Artinya, variabel pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan lain-lain pendapatan yang sah secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel belanja daerah dan belanja langsung.

Cara melakukan uji t adalah sebagai berikut :

- $F_{hitung} \leq F_{tabel}$, maka Ha ditolak dan Ho diterima
- $F_{hitung} \geq F_{tabel}$, maka Ha diterima dan Ho ditolak

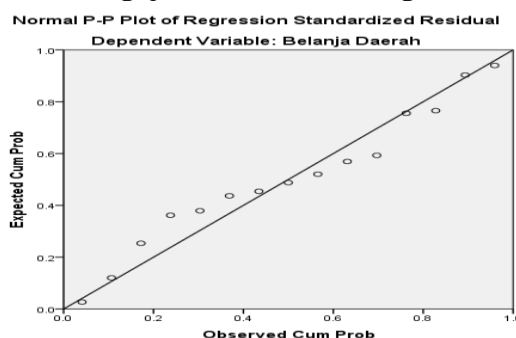
3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian Terhadap Variabel Dependen Belanja Daerah

Uji Normalitas Data

Uji Normalitas Data dapat dilihat dengan menggunakan metode P-P Plot. Hasilnya adalah sebagai berikut :

Gambar 1 Hasil Pengujian Normalitas dengan P-P Plot



Dari uji P-P Plot di atas terlihat bahwa sebaran data membentuk atau mengikuti garis linear, sehingga dapat dikatakan bahwa data berdistribusi normal.

Uji Asumsi Klasik

Uji Multikolinearitas

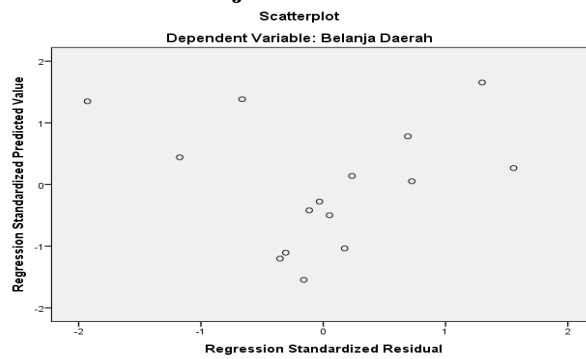
Tabel 1 Uji Multikolinearitas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	1.239	.320		3.874	.003		
PAD	.260	.080	.361	3.253	.008	.178	5.611
DAU	.552	.091	.510	6.049	.000	.308	3.244
LLPYS	.065	.023	.211	2.766	.018	.377	2.650

Berdasarkan output di atas diketahui bahwa : nilai Tolerance Variabel Pendapatan Asli Daerah (X1), Dana Alokasi Umum (X2), dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah (X3) yakni lebih besar dari 0,10. Sementara itu nilai VIF variabel Pendapatan Asli Daerah (X1), Dana Alokasi Umum (X2), dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah (X3) yakni lebih kecil dari 10,00 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi Multikolinearitas.

Uji Heteroskedastisitas

Gambar 2 Uji Heteroskedastisitas



Untuk Uji Heteroskedastisitas dapat dilihat dari scatterplot di atas, jika data menyebar pada garis nol dan tanpa membentuk pola tertentu maka data dapat dikatakan bebas Heteroskedastisitas, atau data homogen.

Uji Autokorelasi

Tabel 2 Uji Autokorelasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.988 ^a	.976	.969	.03434	2.371

a. Predictors: (Constant), LLPYS, DAU, PAD
 b. Dependent Variable: Belanja Daerah

Dari hasil output di atas didapat nilai DW yang dihasilkan dari model regresi adalah 2,371. dari tabel DW dengan signifikansi 0,05 dan jumlah data (n) = 15, serta variabel independen (k) = 3 diperoleh nilai DL sebesar 0,814 dan DU sebesar 1,750. karena nilai DW (2,371) berada pada antara $4-DU \leq DW \leq 4-DL$, ($2,249 \leq 2,371 \leq 4-3,186$), maka tidak menghasilkan kesimpulan yang pasti (berada di daerah keragu-raguan)

Analisis Regresi Berganda

Tabel 3 Korelasi dan Koefisien Determinasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.988 ^a	.976	.969	.03434

a. Predictors: (Constant), LLPYS, DAU, PAD
 b. Dependent Variable: Belanja Daerah

Berdasarkan perhitungan dengan menggunakan SPSS v.22 diperoleh koefisien korelasi dan determinasi, yaitu :

- Nilai Koefisien Korelasi (R) adalah sebesar 0.988. besaran nilai koefisien korelasi ini mengandung arti bahwa keeratan hubungan antara Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah sebagai variabel bebas dengan variabel Belanja Daerah sebagai variabel terikat adalah sangat erat dan bersifat positif.
- Nilai Koefisien Determinasi (R²) 0,976 = 97,6%. Dengan demikian bahwa pengaruh pendapatan pemerintah pada bidang Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah secara bersama-sama terhadap Belanja Daerah di Kabupaten Minahasa adalah sebesar 97,6%. Sedangkan sisanya 2,4% ditentukan oleh variabel-variabel lain.

Uji Statistik-T

Tabel 4 Uji t (Uji Parsial)

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1.239	.320		3.874	.003
	PAD	.260	.080	.361	3.253	.008
	DAU	.552	.091	.510	6.049	.000
	LLPYS	.065	.023	.211	2.766	.018

a. Dependent Variable: Belanja Daerah

Berdasarkan data output SPSS dalam tabel ini maka dapat diberi interpretasi sebagai berikut :

- Persamaan regresi dari penelitian ini adalah $Y=1.239+0.260X_1+0.552X_2+0.065X_3$
- Nilai konstanta sebesar 1.239 mengandung arti bahwa jika Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah bertambah sebesar 1%, maka Belanja Daerah naik sebesar 1.239.
- Nilai Koefisien X1 sebesar 0.260 mengandung arti bahwa jika Pendapatan Asli Daerah bertambah sebesar 1%, maka Belanja Daerah naik sebesar 0.260. Nilai Koefisien X2 sebesar 0.552 mengandung arti bahwa jika Dana Alokasi Umum bertambah sebesar 1% maka Belanja Daerah naik sebesar 0.552. Nilai Koefisien X3 sebesar 0.065 mengandung arti bahwa jika Lain-lain Pendapatan Yang Sah bertambah sebesar 1%, maka Belanja Daerah naik sebesar 0,065.
- Nilai thitung Pendapatan Asli Daerah adalah 3.253, Nilai thitung Dana Alokasi Umum adalah 6.049, dan Nilai thitung Lain-lain Pendapatan Yang Sah adalah 2.766, Nilai ttabel adalah 2.201 yang diperoleh dengan Alpha 0.05 dan df sebesar yakni (15-3-1), pada sisi lain nilai signifikansinya (sig) Pendapatan Asli Daerah 0.008, Dana Alokasi Umum 0.00, dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah 0,018, jadi untuk ketiga variabel tersebut nilai thitung lebih besar dari nilai ttabel, dan nilai signifikansinya lebih kecil dari Alpha, maka Ho ditolak dan Ha diterima berarti bahwa ketiga variabel tersebut memiliki pengaruh secara parsial atau secara sendiri-sendiri terhadap Belanja Daerah.

Uji Statistik-F

Tabel 5 Uji F (Uji Simultan)

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.525	3	.175	148.499	.000 ^b
	Residual	.013	11	.001		
	Total	.538	14			

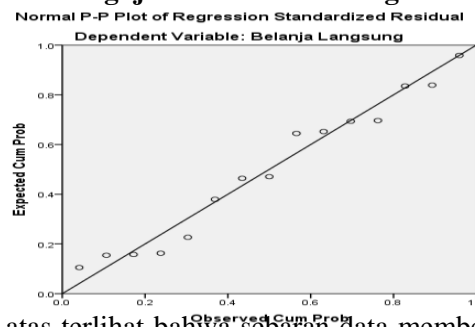
- a. Dependent Variable: Belanja Daerah
- b. Predictors: (Constant), LLPYS, DAU, PAD

Berdasarkan output diatas tampak bahwa nilai Fhitung pada model penelitian ini adalah sebesar 148.499. dengan taraf signifikansi sebesar 0.000. Nilai Ftabel adalah 3.490 yang diperoleh dengan Alpha 0.05 dan df (15=jumlah sampel – 3=variabel bebas). Nilai Fhitung 148.499 lebih besar dari nilai Ftabel 3.490 Maka Ha diterima dan Ho ditolak, dengan demikian Variabel Independen Berpengaruh secara bersama-sama (simultan) terhadap Variabel Dependen.

Hasil Penelitian Terhadap Variabel Dependen Belanja Langsung

Uji Normalitas Data

Gambar 3 Hasil Pengujian Normalitas dengan P-P Plot



Dari uji P-P Plot di atas terlihat bahwa sebaran data membentuk atau mengikuti garis linear, sehingga dapat dikatakan bahwa data berdistribusi normal.

Uji Asumsi Klasik

Uji Multikolinearitas

Tabel 6 Uji Multikolinearitas

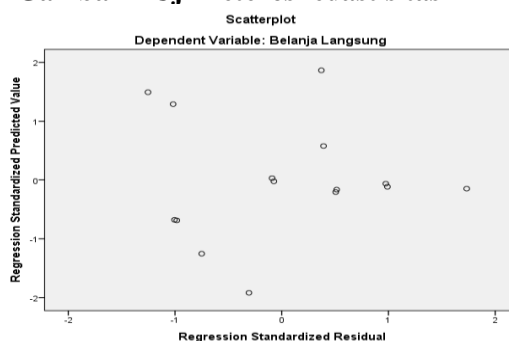
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	-.106	.966		-.110	.914		
PAD	.696	.241	.797	2.885	.015	.178	5.611
DAU	.530	.275	.404	1.925	.080	.308	3.244
LLPYS	-.133	.070	-.358	-1.886	.086	.377	2.650

a. Dependent Variable: BelanjaLangsung

Berdasarkan output di atas diketahui bahwa : nilai Tolerance Variabel Pendapatan Asli Daerah (X1), Dana Alokasi Umum (X2), dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah (X3) yakni lebih besar dari 0,10. Sementara itu nilai VIF variabel Pendapatan Asli Daerah (X1), Dana Alokasi Umum (X2), dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah (X3) yakni lebih kecil dari 10,00 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi Multikolinearitas

Uji Heteroskedastisitas

Gambar 4 Uji Heteroskedastisitas



Untuk Uji Heteroskedastisitas dapat dilihat dari scatterplot di atas, jika data menyebar pada garis nol dan tanpa membentuk pola tertentu maka data dapat dikatakan bebas Heteroskedastisitas, atau data homogen.

Uji Autokorelasi

Tabel 7 Uji Autokorelasi Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.922 ^a	.850	.810	.10371	1.231

a. Predictors: (Constant), LLPYS, DAU, PAD
 b. Dependent Variable: BelanjaLangsung

Dari hasil output di atas didapat nilai DW yang dihasilkan dari model regresi adalah 1,231. dari tabel DW dengan signifikansi 0,05 dan jumlah data (n) = 15, serta variabel independen (k) = 3 diperoleh nilai DL sebesar 0,814 dan DU sebesar 1,750. karena nilai DW (1,231) berada pada antara DL dan DU, maka tidak menghasilkan kesimpulan yang pasti (berada di daerah keragu-raguan)

Analisis Regresi Berganda

Tabel 8 Korelasi dan Koefisien Determinasi Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.922 ^a	.850	.810	.10371

a. Predictors: (Constant), LLPYS, DAU, PAD
 b. Dependent Variable: BelanjaLangsung

Berdasarkan perhitungan dengan menggunakan SPSS v.17 diperoleh koefisien korelasi dan determinasi, yaitu :

- Nilai Koefisien Korelasi (R) adalah sebesar 0.922. besaran nilai koefisien korelasi ini mengandung arti bahwa keeratan hubungan antara Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah sebagai variabel bebas dengan variabel Belanja Langsung sebagai variabel terikat adalah sangat erat dan bersifat positif.
- Nilai Koefisien Determinasi (R²) 0,850 = 85%. Dengan demikian bahwa pengaruh pendapatan pemerintah pada bidang Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah secara bersama-sama terhadap Belanja Daerah di Kabupaten Minahasa adalah sebesar 85%. Sedangkan sisanya 15% ditentukan oleh variabel-variabel lain.

Uji Statistik-T

Tabel 9 Uji t (Uji Parsial)

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-.106	.966		-.110	.914
PAD	.696	.241	.797	2.885	.015
DAU	.530	.275	.404	1.925	.080
LLPYS	-.133	.070	-.358	-1.886	.086

a. Dependent Variable: BelanjaLangsung

Berdasarkan data output SPSS dalam tabel ini maka dapat diberi interpretasi sebagai berikut :

- Persamaan regresi dari penelitian ini adalah $(Y = -0,106 + 0,696X_1 + 0,530X_2 - 0,133X_3)$
- Nilai konstanta sebesar -0,106 mengandung arti bahwa jika Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah bertambah sebesar 1%, maka Belanja Langsung sebesar -0,106.
- Nilai Koefisien X1 sebesar 0,696 mengandung arti bahwa jika Pendapatan Asli Daerah bertambah sebesar 1%, maka Belanja Langsung naik sebesar 0,696. Nilai Koefisien X2 sebesar 0,530 mengandung arti bahwa jika Dana Alokasi Umum bertambah sebesar 1% maka Belanja Langsung naik sebesar 0,530. Nilai Koefisien X3 sebesar -0,133 mengandung arti bahwa jika Lain-lain Pendapatan Yang Sah bertambah sebesar 1%, maka Belanja Langsung turun sebesar -0,133.
- Nilai t_{hitung} Pendapatan Asli Daerah adalah 2,885, Nilai t_{hitung} Dana Alokasi Umum adalah 1,925, dan Nilai t_{hitung} Lain-lain Pendapatan Yang Sah adalah -1,886, Nilai t_{tabel} adalah 2,201 yang diperoleh dengan Alpha 0,05 dan df sebesar yakni (15-3-1), pada sisi lain nilai signifikansinya (sig) Pendapatan Asli Daerah 0,015, Dana Alokasi Umum 0,80, dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah 0,086, karena hanya nilai t_{hitung} X1 lebih besar dari nilai t_{tabel} , dan nilai signifikansinya X1 lebih kecil dari Alpha, maka H_0 ditolak dan H_a diterima jadi hanya variabel X1 (Pendapatan Asli Daerah) yang memiliki pengaruh secara parsial atau secara sendiri terhadap Belanja Langsung, dan variabel X2 dan X3 tersebut nilai t_{hitung} nya lebih kecil dari nilai t_{tabel} , dan nilai signifikansinya lebih besar dari Alpha, maka H_0 diterima berarti bahwa kedua variabel tersebut kurang berpengaruh secara parsial atau secara sendiri-sendiri terhadap Belanja Langsung.

Uji Statistik-F

Tabel 10 Uji F (Uji Simultan)

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	.673	3	.224	20.858	.000 ^p
Residual	.118	11	.011		
Total	.791	14			

a. Dependent Variable: BelanjaLangsung
 b. Predictors: (Constant), LLPYS, DAU, PAD

Berdasarkan output diatas tampak bahwa nilai F_{hitung} pada model penelitian ini adalah sebesar 20,858. dengan taraf signifikansi sebesar 0.000. Nilai F_{tabel} adalah 3.490 yang diperoleh dengan Alpha 0.05 dan df (15=jumlah sampel – 3=variabel bebas). Nilai F_{hitung} 20,858 lebih besar dari nilai F_{tabel} 3.490 Maka H_a diterima dan H_0 ditolak, dengan demikian Variabel Independen Berpengaruh secara bersama-sama (simultan) terhadap Variabel Dependen.

Pembahasan Analisis

Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah yang berlaku, guna untuk keperluan daerah yang bersangkutan dalam pembiayaan kegiatannya. Dalam penelitian Model 1 menunjukkan bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah (X1), berpengaruh positif secara parsial terhadap Belanja Daerah di Kabupaten Minahasa, hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Prakosa (2004), Kusumadewi dan Rahman (2007), Maimunah (2006); yang menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah. Begitu pula dengan penelitian model 2 menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (X1) berpengaruh positif secara parsial terhadap Belanja Langsung, hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurul Hidayah & Hari Setiyawati, (2014); yang menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Langsung.

Dana Alokasi Umum adalah salah satu sumber pendapatan daerah yang berasal dari pemerintah pusat yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan operasional daerah. Dalam penelitian Model 1 menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum (X2) berpengaruh positif secara parsial terhadap Belanja Daerah di Kabupaten Minahasa, hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Prakosa (2004), Kusumadewi dan Rahman (2007), Nurul Hidayah & Hari Setiyawati, (2014), Maimunah (2006), Lestari L F Simanjuntak, Ahmad Subeki, Ika Sasti Ferina, dan Hasni Yusrianty (2013); yang menyatakan bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah. Namun dalam penelitian Model 2 menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum (X2) positif namun kurang berpengaruh signifikansi secara parsial terhadap Belanja Langsung, hasil penelitian ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurul Hidayah & Hari Setiyawati, (2014); yang menyatakan bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Belanja Langsung.

Lain-lain Pendapatan Yang Sah adalah pendapatan lainnya dari pemerintah pusat dan/ dari instansi pusat, serta dari daerah lainnya. Dalam penelitian Model 1 menunjukkan bahwa Lain-lain Pendapatan Yang Sah (X3) berpengaruh positif secara parsial terhadap Belanja Daerah di Kabupaten Minahasa, hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Dian Nurdiawaty, Badrus Zaman, dan Efda Kristinawati (2017); yang menyatakan bahwa Lain-lain Pendapatan Yang Sah berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah. Tetapi Pada penelitian Model 2 menunjukkan bahwa Lain-lain Pendapatan Yang Sah (X3) tidak memiliki pengaruh terhadap Belanja Langsung, sedangkan pada model penelitian 1 menunjukkan bahwa Lain-lain Pendapatan Yang Sah memiliki pengaruh yang signifikansi. hal ini disebabkan karena Lain-lain Pendapatan Yang Sah yang diterima oleh daerah tidak digunakan untuk pelaksanaan program dan kegiatan secara langsung antar daerah, sehingga peran Lain-lain Pendapatan Yang Sah tidak berpengaruh terhadap Belanja Langsung. Seharusnya Lain-lain Pendapatan Yang Sah yang diterima daerah di alokasikan untuk belanja pembangunan sebagai sarana dan prasarana untuk meningkatkan Belanja Daerah, tetapi Lain-lain Pendapatan Yang Sah tersebut dialokasikan untuk Belanja Langsung sehingga alokasi tersebut tidak tepat sasaran. Hal inilah mungkin yang menyebabkan Lain-lain Pendapatan Yang Sah tidak berpengaruh terhadap Belanja Langsung.

Pada Uji F (uji simultan) menunjukkan penelitian model 1 menunjukkan variabel Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah, berpengaruh secara simultan atau secara bersama-sama terhadap Belanja Daerah, begitu juga pada penelitian Model 2 menunjukkan variabel Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah, berpengaruh secara simultan atau secara bersama-sama terhadap Belanja Langsung.

4. PENUTUP

Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Hasil analisis Model 1 dan 2 menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Belanja Daerah dan Belanja Langsung.
2. Hasil analisis Model 1 menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Belanja Daerah, tetapi pada hasil analisis model 2 menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum kurang berpengaruh terhadap Belanja Langsung.
3. Hasil analisis Model 1 menunjukkan bahwa Lain-lain Pendapatan Yang Sah Berpengaruh terhadap Belanja Daerah, tetapi pada hasil analisis model 2 menunjukkan bahwa Lain-lain Pendapatan Yang Sah tidak berpengaruh terhadap Belanja Langsung.
4. Hasil analisis Model 1 dan 2 menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah berpengaruh secara simultan terhadap Belanja Daerah dan berpengaruh simultan juga terhadap Belanja Langsung.

Saran

1. Bagi Pemerintah Daerah diharapkan untuk dapat meningkatkan kemandirian pemerintah dan mengurangi ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana yang diberikan oleh pemerintah pusat.
2. Pemerintah harus memperhatikan satu pos penerimaan yang selalu menunjukkan hasil kurang optimal yaitu PBB-P2 (penetapan pajak bumi dan perkotaan).
3. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk lebih mengembangkan penelitian ini dengan menambah variabel-variabel lain yang belum dicantumkan dalam penelitian ini misalnya saja variabel Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, Belanja Modal, PDRB, dan Kebijakan Pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Dedy Haryadi et al, 2001 dalam Pratiwi, 2007** *Tentang proses penyusunan penerimaan dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah dan proses penyusunan belanja pembangunan disusun oleh Bappeda*
- Diah Nurdiwaty, Badrus Zaman, Efda Kristiawati. 2017.** *Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah.* Vol. 17 No. 1 Bulan Juli Tahun 2017.
- Elita dalam Pratiwi, (2007),** *Identifikasi Sumber Pendapatan Asli Daerah dalam rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah*”, *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik.*
- Ghozali dan Ratmono 2008,** *Anggara Pendapatan dan Belanja Daerah.*
- Hamdani, et, al, 2014** *Strategi Belajar Mengajar.* Bandung: Pustaka Setia <http://www.bpsminahasa.go.id>
- Kusumadewi dan Rahman (2007)** *Flypaper Effect Pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/kota di Indonesia.*
- Lestari L F Simanjuntak, Ahmad Subeki, Ika Sasti Ferina, dan Hasni Yusrianty (2013),** dengan judul *Analisis Efek Flypaper Dalam Dana Alokasi Umum Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah Kabupaten Dan Kota Di Sumatera Selatan*
- Maimunah (2006)** *flypapper effect pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap belanja daerah Pada Kabupaten / Kota di Pulau Sumatera*

Nurul Hidayah & Hari Setiyawati (2014), *Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Langsung Di Propinsi Jawa Tengah.*

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang pembagian Belanja Langsung.

Prakosa (2004) *Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Prediksi Belanja Daerah (Studi Empirik di Wilayah Provinsi Jawa Tengah dan DIY.*

Tresh (2002:920) *“Finance Public Anormativ Theory”*. Department Of Econnomic, Boston College Chestnut Hill, Massachusetts.

UU No. 32 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Dan UU No 33 Tahun 2014, Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah.

UU Nomor 33 Tahun 2004 Tentang, Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah